

KUALITAS PERWIRA MERUPAKAN KUNCI KEBERHASILAN PERAN ABRI PADA ABAD KE-21

Djoko Subroto*

TNI/ABRI lahir dari rakyat. – berjuang bersama-sama dan untuk kepentingan rakyat – melaksanakan fungsi pertahanan keamanan dan fungsi sosial politik. Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai sekarang TNI/ABRI telah membuktikan kemampuannya dalam mempertahankan, mengawal, dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebersamaan dan kemanunggalan TNI/ABRI ini telah membentuk jatidiri TNI/ABRI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional.

Sejarah perjuangan dan pembangunan bangsa menunjukkan bahwa perjalanan dalam mengisi kemerdekaan itu tidak berjalan mulus, tetapi menghadapi banyak ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT), baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Menghadapi hakikat ancaman tersebut, kebersamaan TNI/ABRI dan rakyat telah membentuk sinergi kekuatan yang ampuh dan telah teruji mampu mengatasinya.

Pembangunan nasional dalam bentuk Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I), mulai dengan Pembangunan Lima Tahun Kesatu (Pelita I) yang dilakukan sejak tahun 1966 secara nyata telah menunjukkan keberhasilan yang cukup berarti,

walaupun dirasakan masih adanya berbagai kendala dan kekurangan yang belum dapat memenuhi kepentingan semua pihak. Namun semua komponen bangsa termasuk TNI/ABRI tetap ber tekad dan terus berjuang bersama-sama dengan rakyat secara bahu membahu dalam menyuk seskan pembangunan nasional sebagai upaya untuk mencapai tujuan nasional dan cita-cita nasional. Khusus menghadapi

* Mayjen TNI Djoko Subroto, pernah menjabat Kasdam IV Diponegoro, sekarang Gubernur Akademi Militer Magelang. Tulisan ini merupakan pokok pikiran dari Seminar Nasional Akmil, 7-8-1997.

abad ke-21 dengan fenomena perubahan dan tantangan yang semakin kompleks, semua komponen bangsa ditantang untuk berupaya mengatasi kendala dan memanfaatkan peluang yang tersedia sebesar-besarnya, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Generasi muda Perwira ABRI sebagai pemimpin di masa sekarang dan yang akan datang, harus benar-benar menyadari bahwa tantangan tersebut tidak dapat dicegah atau dihindari. Pengalaman dan hasil uji sejarah telah membulatkan tekad bangsa Indonesia umumnya dan TNI/ABRI khususnya dalam menghadapi fenomena tantangan dan tuntutan abad ke-21 dengan tetap berkeyakinan akan kebenaran Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Dengan tekad itu, jatidiri bangsa Indonesia dan TNI/ABRI akan tetap tegak dan tidak bergeser, dalam menghadapi serbuan nilai-nilai asing.

Realitas dan Kecenderungan Global

1. Perkembangan dan Perubahan

Era globalisasi adalah periode baru dalam sejarah manusia yang membawa perubahan ter-

hadap visi, cara berpikir dan cara kerja. Globalisasi sebagai suatu proses pada hakikatnya telah berlangsung jauh sebelum abad ke-20. Dalam perkembangannya menunjukkan eksistensi dan intensitas yang tinggi sehingga menantang kehidupan masa kini dengan janji perubahan secara cepat dan mendasar dalam semua segi dan sendi kehidupan.

Hakikat globalisasi sebagai kenyataan subyektif sesungguhnya menunjukkan suatu proses dalam kesadaran manusia yang melihat dirinya sebagai partisipan dalam masyarakat dunia yang semakin menyatu. Sebagai kenyataan obyektif, globalisasi adalah suatu proses "menyempitnya" ruang dan waktu serta "menciutnya" dunia yang berkembang dalam kondisi yang penuh dengan paradoks, meliputi universalisasi versus pluralisasi, integrasi versus fragmentasi, sentralisasi versus otonomisasi dan antara kompetisi versus kooperasi. Fenomena paradoks juga dapat digambarkan sebagai suatu pikiran dan tindakan manusia yang cenderung bersifat global juga berpikir dan bertindak lokal, serta mengarah kepada bentuk-bentuk primordialisme baru. Manusia tidak lagi hanya menemukan identitasnya pada bangsa, melainkan cenderung juga kepada sukunya. Ini dibuktikan dengan munculnya

negara-negara kesukuan (*ethnic state*) seperti yang terjadi di lingkungan negara-negara bekas Uni Soviet dan Yugoslavia. Hal yang sama nyaris juga terjadi di Kanada, yaitu Quebec yang ingin berdiri sendiri sebagai negara dan suku Macan Tamil yang dengan kekerasan senjata masih terus berupaya memperjuangkan eksistensinya untuk dapat menjadi sebuah negara merdeka.

Menurunnya pamor komunis dalam percaturan politik dunia, sebagai implikasi runtuhnya negara Uni Soviet telah dimanfaatkan oleh penganut faham liberalisme/kapitalisme sebagai alat pengendali percaturan politik dunia. Kondisi ini juga dimanfaatkan oleh lembaga swadaya masyarakat internasional dengan melemparkan isu HAM, demokratisasi, dan lingkungan hidup. Selanjutnya, oleh negara maju isu tersebut telah dijadikan visi pada kehidupan masyarakat sebagai *bargaining power* dalam menilai kesejahteraan dan kestabilan suatu bangsa.

Liberalisasi ekonomi yang mendorong semakin deras arus perdagangan bebas dan investasi telah melahirkan berbagai lembaga dan forum ekonomi di tingkat internasional dan regional seperti WTO, NAFTA, AFTA, APEC, dan Uni Eropa (EU). Berbagai lembaga dan forum ekonomi tersebut sangat berperan mengatur perdagang-

an dan investasi antar bangsa di berbagai kawasan dan telah menembus batas-batas negara. Kebutuhan SDA untuk memenuhi kepentingan nasional suatu bangsa dapat menjadi sumber konflik, di sisi lain keterbatasan SDA dan terbatasnya kualitas SDM suatu bangsa merupakan hambatan dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan seperti di beberapa negara Afrika.

Dalam konteks global, permasalahan yang muncul adalah bagaimana suatu negara bangsa dapat *survive*. Era globalisasi dengan arus perdagangan bebas dan investasi maupun informasi, menuntut adanya kemampuan daya saing yang tinggi dalam diri sumber daya manusia negara bangsa, sehingga tetap mampu mendukung kepentingan nasionalnya masing-masing.

Penggunaan kekuatan bersenjata sebagai instrumen penyelesaian konflik antar negara semakin tidak populer, sehingga peranan Pasukan Perdamaian PBB menjadi semakin mengemuka dalam penyelesaian konflik yang mengarah pada kekerasan bersenjata. Permasalahan timbul justru pada konflik internal suatu negara yang tidak ingin melibatkan kekuatan luar karena merupakan konflik dalam yurisdiksi kedaulatan negara bangsa. Kelompok-kelompok dalam konflik internal ini dapat berkembang dengan memaksakan

penyelesaiannya tanpa mengindahkan nilai-nilai yang berlaku, apalagi jika disertai dengan kekerasan dan radikalitas. Konflik ini dapat meluas menjadi ancaman yang pada satu sisi ekstrim menjadi ancaman terhadap integrasi bangsa dan negara.

2. Pergeseran Nilai

Globalisasi merupakan proses transparansi dan menjadikan semakin mengecilnya ruang dan waktu, sehingga menjadikan dunia sebagai satu keseluruhan, bahkan sebagai rangkaian manifestasi kehidupan baru. Hal ini membawa implikasi dan munculnya nilai-nilai universal dan nilai-nilai baru dari berbagai kecenderungan serta tuntutan tertentu dalam menjalankan dinamika kehidupan global. Dalam dinamika kehidupan global itu, nilai-nilai universal menyesuaikan dengan nilai-nilai lokal atau nilai-nilai lokal mengadopsi nilai-nilai universal yang merupakan wujud perubahan atau pergeseran nilai, meliputi :

Pertama, di bidang kesetaraan peluang bagi setiap bangsa dan negara, semakin terbukanya kesempatan untuk mewujudkan kegiatan dan interaksi global di bidang ekonomi, perdagangan, industri, usaha dan jasa, serta pendidikan.

Kedua, dibidang kerjasama antar negara, semakin tumbuh-

nya bentuk-bentuk kerjasama di antara bangsa-bangsa, baik dalam lingkup global maupun regional dengan melibatkan seluruh aspek kehidupan negara atau sebagian dari padanya di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya.

Ketiga, di bidang wawasan kebangsaan munculnya upaya mempertahankan kepentingan kemandirian negara bangsa ke arah lebih mengakomodasikan pengaruh kuat yang datang dari forum dan lembaga internasional maupun regional.

Keempat, di bidang arah pandang dan orientasi internasional terjadinya perubahan orientasi dari geo-politik ke geo-ekonomi serta sikap yang lebih mengutamakan pertimbangan yang menggunakan dimensi ekonomi daripada dimensi politik.

Kelima, di bidang hubungan ekonomi, penonjolan orientasi kepentingan ekonomi nasional disesuaikan dengan kepentingan ekonomi regional atau kepentingan ekonomi kawasan, atau kepentingan ekonomi bersama dari bangsa-bangsa yang berada di satu kawasan yang memiliki kepentingan nasional yang relatif sama.

Keenam, di bidang struktur hubungan makro dan universal adalah terjadinya strukturisasi yang mencakup wilayah dan kawasan dunia sebagai satu keseluruhan global di bidang ekono-

mi, politik, sosial dan budaya.

Ketujuh, di bidang interaksi sosial budaya terjadi peralihan budaya dari sikap dan berpikir yang tradisional kepada sikap konsumerisme modern, dari kolektivisme kepada individualisme, dari hubungan kekerabatan kepada hubungan bisnis, dari hubungan integralistik kepada egoisme sektoral.

Kedelapan, di bidang hubungan internasional khususnya di dalam penyelesaian konflik untuk menciptakan perdamaian dunia lebih mengutamakan diplomasi dan instrumen damai lainnya dari pada penggunaan kekerasan bersenjata.

3. Tatanan Baru

Tatanan baru di bidang politik, menempatkan keberadaan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya yang berkuasa dan menempatkan dirinya sebagai polisi dunia. Hal ini terlihat dari semakin kuatnya dominasi Amerika Serikat dalam setiap diplomasi internasional, baik dalam penyelesaian konflik maupun dalam upaya penciptaan stabilitas keamanan kawasan. Hak asasi manusia, demokratisasi, dan lingkungan hidup menjadi isu dalam menjalin hubungan internasional guna memenuhi kepentingan nasionalnya.

Di bidang hubungan luar negeri, kerja sama tidak lagi dida-

sarkan semata-mata atas pertimbangan kepentingan nasional atau posisi subyektif masing-masing negara, melainkan atas pertimbangan kebersamaan. Kepentingan dari masing-masing sulit dipertahankan kalau tidak diletakkan dalam konteks relasi saling ketergantungan antar negara bangsa.

Tatanan baru di bidang ekonomi, khususnya pada aspek arus perdagangan bebas dan investasi yang bertujuan mencari keuntungan melalui adu kualitas dan keunggulan kompetitif yang menuntut dimilikinya modal, teknologi, etos kerja, dan manajemen yang handal. Kebanggaan atas pemilikan kekayaan sumber daya alam menuntut semakin dibutuhkannya kemampuan riil untuk mengolahnya dalam rangka mendapatkan nilai tambah yang besar serta produktivitas yang tinggi dan bermutu melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi secara tuntas.

Industri semakin dituntut mempunyai peran yang menentukan dalam upaya pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi, sedangkan proses pengolahan komponen-komponen industri tidak lagi terkonsentrasi di suatu tempat melainkan tersebar di beberapa negara lain yang dianggap menguntungkan dan menjamin kualitas produksi. Di bidang industri pertahanan dan piranti lunak, produksi kom-

ponen dilakukan di beberapa negara.

Di bidang sosial budaya, proses penyelenggaraan pendidikan akan menentukan masa depan dan peran dari suatu bangsa. Kesalahan dalam menentukan kebijakan pendidikan akan membuat suatu bangsa menjadi penonton dalam pentas global dan akan hidup terasing serta terbelakang di tengah-tengah kemajuan dunia dan lingkungan hidupnya.

Kepedulian bersama menjadi semakin menonjol, tetapi intensitas persaingan juga tidak semakin menurun. Persaingan yang amat ketat harus mengandalkan kekuatan masing-masing dengan perhitungan obyektif dan rasional, sehingga faktor sumber daya manusia menjadi amat penting dalam membentuk daya saing yang kuat. Sumber daya manusia tidak saja tergantung kepada profesionalisme semata, melainkan juga harus didukung oleh semangat, watak, sikap dan etos kerja, serta struktur sosial yang kondusif.

4. Tantangan, Tuntutan dan Peluang

Tantangan yang dihadapi oleh setiap negara, khususnya negara-negara berkembang adalah persaingan menjadi tidak sehat dan tidak adil kalau di antara bangsa-bangsa di dunia masih terdapat kesenjangan eko-

nomi, sosial dan informasi. Kesenjangan tersebut bersifat struktural, sebagai akibat lemahnya infrastruktur sosial negara-negara berkembang yang tidak mampu menyerap dan memanfaatkan kecanggihan temuan-temuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadi masalah utama. Sesungguhnya setiap negara berkembang tidak berkeberatan dalam menerapkan persaingan bebas, apabila memiliki kemampuan untuk bersaing. Masih dirasakan adanya ganjalan dalam menjalankan dialog yaitu diperlukan aturan global dengan pertimbangan logis pragmatis yang dilandasi etika dan moral.

Dalam era globalisasi, tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap negara—khususnya negara-negara berkembang—adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan setiap dinamika perkembangan global dan regional melalui kesiapan secara konsepsional dan komprehensif di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsepsi dimaksud meliputi penentuan strategi dan langkah-langkah pembangunan, meliputi pembangunan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, dengan mempertimbangkan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang, disesuaikan dengan gerak dinamik

dan kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh lembaga-lembaga ekonomi internasional.

Sementara itu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh setiap negara, khususnya oleh negara-negara berkembang adalah besarnya kepentingan negara-negara maju atas kemajuan negara-negara berkembang yang menjadi *bargaining power*-nya, juga pemberian fasilitas ekspor negara berkembang ke negara maju merupakan peluang untuk memasuki perdagangan internasional yang harus dimanfaatkan Indonesia dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas pengusaha Indonesia dalam ekonomi global.

Keleluasaan atau kelonggaran waktu yang lebih panjang dalam memenuhi ketentuan perdagangan bebas yang diberikan negara maju merupakan peluang yang baik bagi Indonesia untuk meningkatkan produktivitas kerja, iklim berusaha, dan kemampuan daya saing sehingga siap memasuki pasar bebas dunia.

Selanjutnya, peluang lain yang dimiliki Indonesia adalah tenaga kerja yang berlimpah dan relatif murah, dan kesempatan berusaha yang terbuka luas berarti memiliki keunggulan komparatif. Keunggulan ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan pemberian pelatihan kerja dan

pemberian subsidi oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki tenaga kerja.

Visi Bangsa Indonesia

1. Relevansi Ideologi Pancasila

Globalisasi dengan segala ciri dan kecenderungannya mendorong bangsa-bangsa di dunia untuk menjalankan usaha-usaha penyesuaian. Di samping peluang dan tantangan, globalisasi, juga membawa muatan semangat, jalan pikiran liberal, serta nilai-nilai liberal yang dapat mengancam nilai kebangsaan, jatidiri, dan sistem kehidupan Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta mengancam negara bangsa. Reformasi struktur ekonomi maupun penyesuaian kebijakan politik harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai lokal (nasional) dengan penyesuaian yang memadai guna menghindarkan masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat dari konflik-konflik yang dapat menghambat kepentingan nasional dalam pencapaian tujuan nasional Indonesia. Sejarah negara-negara bekas Uni Soviet dan Yugoslavia menunjukkan negara bangsa tersebut mengalami disintegrasi karena terjadinya perubahan yang demikian drastisnya sehingga tidak terkendali dan per-

ubahan itu menggilas negara bangsa itu sendiri.

Dalam konteks global, wawasan kebangsaan tetap me-wujud dalam negara kebangsaan sebagai wujud nyata yang lembaga dari kesadaran nasional yang semakin menguat dan sebagai orientasi nilai yang mampu memperkuat identitas dan memberikan motivasi pembangunan nasional. Demikian pula, Pancasila tetap relevan dan mutlak diperlukan sebagai ideologi bangsa Indonesia karena; pertama, melalui Pancasila bangsa Indonesia menegaskan orientasi nilainya demi perwujudan nilai-nilai yang didambakan sebagai ukuran hidup, terwujudnya nilai keadilan dan kemakmuran, nilai-nilai dasar dan nilai instrumental, serta memiliki dimensi moral kemanusiaan; kedua, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk melawan ketidakadilan, kemiskinan, kesenjangan, keterbelakangan, kekerasan dan sebagainya, ketiga; Pancasila bertujuan mewujudkan demokrasi dalam arti politik maupun ekonomi sehingga mampu mengadopsi nilai-nilai universal sesuai jatidiri bangsa Indonesia. Singkatnya, Pancasila sebagai ideologi negara bangsa Indonesia akan membawa masyarakat bangsa Indonesia ke dalam kehidupan global tanpa kehilangan jatidirinya, tetap dalam keseimbangan lahir dan batin, mate-

rial dan spiritual, antara hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, dan antara dirinya dan penciptanya.

2. Kecenderungan dan Realitas Baru

Globalisasi merupakan kenyataan historis yang berjalan melalui tahap-tahap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Satu hal yang perlu mendapat perhatian serius bahwa fenomena tersebut telah memunculkan berbagai kecenderungan besar dan realitas baru yang membawa arus dan gelombang perubahan yang bersifat global. Sendi-sendi kehidupan masyarakat dunia tengah mengalami proses adaptasi gelombang perubahan, yaitu globalisasi, liberalisasi, dan transisi.

Globalisasi telah menghadirkan berbagai sistem nilai, gaya hidup, dan paradoks serta peluang dan pilihan baru untuk kemajuan bangsa. Selain itu ia juga memunculkan kendala dan muatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Globalisasi telah membuat individu, informasi, investasi, dan industri datang dan pergi melintasi batas-batas wilayah negara bangsa. Gelombang liberalisasi juga merambah ke aspek kehidupan yang lain. Nilai-nilai liberal ternyata telah mendatangkan berbagai masa-

lah kebangsaan. Bangsa Indonesia yang tengah berada dalam masa transisi berarti Indonesia sedang menghadapi konflik dan kerawanan.

Jika kita menyimak kehidupan masyarakat Indonesia, yang sedang memasuki masa transisional, maka wujud kecenderungan dan realitas baru yang dihadapi adalah:

Pertama, keberhasilan di bidang pembangunan ekonomi, telah meningkatkan harapan dan tuntutan masyarakat. Masyarakat cenderung kurang sabar dan menginginkan peningkatan penghasilan kesejahteraannya secara cepat (*instant*). Tuntutan masyarakat selalu lebih cepat dibandingkan dengan kapasitas untuk memenuhinya, akibatnya mereka merasa tertinggal, terpinggir dan tersisihkan. Meskipun dalam realitasnya penghasilan dan kesejahteraannya selalu meningkat, namun sepanjang belum mampu mencukupi kebutuhannya, mereka mudah frustrasi dan tidak puas. Kondisi demikian jika dimanipulasi, diagitasi dan dimobilisasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab akan mudah meletupkan gejolak dan kerusuhan sosial.

Kedua, masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang memiliki berbagai karakter, apabila tidak diakomodasikan secara baik sering menimbulkan konflik atau benturan antar ke-

lompok.

Ketiga, daya kritis masyarakat meningkat tajam akibat pembangunan dan sentuhan dengan dunia luar. Masyarakat demikian cenderung menuntut peran serta yang tinggi di bidang kehidupan politik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Permasalahan akan muncul jika wujud dan model partisipasi politik itu tidak mengindahkan nilai, tatanan dan tata krama politik yang berlaku, apalagi jika disertai dengan kekeerasan dan radikalitas.

Bangsa Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan yang menyangkut sistem kehidupan nasional adalah sebagai berikut:

Di bidang ideologi, seluruh organisasi politik dan organisasi masyarakat telah menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tantangan yang dihadapi adalah sejauh mana kita mempunyai keberanian untuk memfungsikan Pancasila secara riil sebagai acuan kritik terhadap pembangunan yang sedang berlangsung, terutama terhadap sistem yang sedang berjalan serta jajaran lembaga dan aparatur pemerintah. Secara konkrit Pancasila perlu dilihat dalam kenyataan yaitu sejauh mana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tercermin dalam penghayatan dan pengamalan bang-

sa Indonesia, terutama penyelenggara negara yang diserahkan untuk memimpin dan karenanya bertanggung jawab secara bersama maupun secara individual atas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Di bidang politik, permasalahan yang dihadapi adalah semakin maraknya tuntutan partisipasi politik yang akan menimbulkan masalah jika model partisipasi politik itu tidak mengindahkan etika, tatanan dan tata krama politik yang berlaku apalagi bila disertai kekerasan dan radikalitas, dengan mengedepankan isu-isu global, demokratisasi, hak azasi manusia dan lingkungan hidup. Tantangan yang harus dijawab dalam hal ini adalah menyangkut peningkatan kualitas dan kesadaran berpolitik sesuai dengan nilai, tatanan, etika, tata krama politik serta elemen-elemen dasar politik yang berlaku.

Di bidang ekonomi, permasalahan yang tengah kita hadapi adalah terbatasnya kualitas sumber daya manusia dan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja sehingga daya saing yang dimiliki menjadi sangat terbatas dan kemampuan ekspor juga terbatas. Hal ini ditandai dengan merosotnya nilai tukar rupiah yang dihadapkan dengan strategi perdagangan mata uang sebagai suatu komoditi yang dilancarkan oleh institusi pengelola

modal (*Fund Manager*), memberikan dampak negatif yang luas terhadap semua aspek kehidupan. Di samping itu, semakin meningkatnya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dengan kesempatan dan lapangan kerja, dibarengi tuntutan dan harapan masyarakat yang sering kali melebihi kapasitas untuk memenuhinya.

Di bidang Sosial Budaya, permasalahan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia, adalah belum meratanya hasil pembangunan menyebabkan kesenjangan dan ketertinggalan sebagian masyarakat yang merupakan kerawanan sosial serta menjadi masalah sosial yang dapat berkembang menjadi masalah SARA dan kerusuhan sosial. Tingkat kesempatan mengikuti pendidikan yang belum merata akan menambah kesulitan dalam memperoleh kesempatan kerja. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat memicu munculnya tuntutan dan permintaan masyarakat di luar nilai-nilai dan norma hukum yang berlaku. Tantangan kita adalah perlunya peningkatan lapangan kerja, kesempatan kerja, dan kuantitas dan kualitas tenaga kerja.

Di bidang Hankam, masalah yang dihadapi adalah semakin meningkatnya kasus-kasus keamanan maupun Kamtibmas di seluruh pelosok tanah air, baik secara kuantitatif maupun kua-

litatif. Maraknya peredaran dan penggunaan obat terlarang, ekstasi, ganja dan sejenisnya, serta munculnya kejahatan perbankan. Masih belum tuntasnya penanganan GPK Irian Jaya, Timor Timur dan Aceh.

Tantangan di bidang ini adalah pemantapan keamanan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat keamanan, serta upaya meningkatkan kerjasama internasional dalam memberantas kejahatan dan menegakkan hukum.

Dengan derasnya arus semangat dan nilai-nilai universal, dan nilai-nilai liberal yang datang dengan gelombang globalisasi, liberalisasi, dan masa transisi akan meningkatkan permasalahan, dan bila tidak dapat diatasi secara konsepsional, maka permasalahan tersebut akan berkembang menjadi potensi ancaman, selanjutnya di kemudian hari akan menjadi ancaman terhadap keutuhan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau menjadi sumber terjadinya disintegrasi bangsa dan menghambat kelangsungan jalannya pembangunan nasional.

3. Kepentingan Nasional

Misi utama kepemimpinan bangsa di masa depan, pada hakikatnya adalah bagaimana

mengajak dan menggerakkan masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

Berdasarkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, maka kepentingan utama bangsa Indonesia pada abad ke-21 pada hakikatnya adalah dapat berlangsung dan suksesnya pembangunan nasional sehingga mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, mandiri, adil, aman dan sejahtera. Elemen mendasar kepentingan utama bangsa Indonesia, yaitu:

Pertama, tetap eksis dan berlangsungnya Pancasila, UUD 1945 dan keseluruhan sistem nilai bangsa.

Kedua, tetap tumbuh dan makin mantapnya ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional, makin mantapnya kehidupan demokrasi Pancasila, ditopang oleh keamanan dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Ketiga, makin berkembangnya kontribusi Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian dunia serta makin mantapnya peran aktif positif dalam percaturan global.

Tiga kepentingan utama bangsa ini dapat dijabarkan dalam sepuluh kepentingan nasional yang lebih bersifat operasional meliputi: (1) mempertahankan keamanan dan stabilitas

nasional, (2) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (3) memantapkan kehidupan Demokrasi Pancasila, (4) memantapkan integrasi nasional, (5) mengurangi kesenjangan dan ketertinggalan masyarakat, (6) mempertahankan jati diri dan sistem nilai bangsa Indonesia, (7) meningkatkan efektivitas manajemen pembangunan, (8) meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing bangsa, (9) meningkatkan penguasaan ilmupengetahuan dan teknologi, dan (10) mempertahankan peran internasional Indonesia.

Sikap dan Peran TNI/ABRI

1. Sikap ABRI

Perkembangan global dengan berbagai dampaknya, menunjukkan adanya perubahan-perubahan yang cepat dalam berbagai aspek kehidupan. Globalisasi bukan hanya menghadirkan konsep geo-ekonomi, yang menggeser konsep geo-politik, melainkan juga telah menimbulkan tantangan dan permasalahan terhadap konsep negara bangsa dan kedaulatan negara. Perubahan dan perkembangan dapat terjadi secara mendadak dan dalam waktu yang singkat di kawasan nasional, regional maupun internasional.

Bangsa Indonesia yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan perlu meningkatkan

kewaspadaan guna mengantisipasi munculnya berbagai tantangan dan permasalahan yang dapat menggagalkan tercapainya tujuan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia.

ABRI sebagai modal dasar pembangunan nasional, bersama-sama dengan komponen bangsa harus mampu mewujudkan kepentingan nasional dengan menjamin kelangsungan pembangunan demi tercapainya tujuan dan cita-cita nasional. TNI/ABRI dituntut untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan dalam mengantisipasi, menetralisasi dan mengeliminasi berbagai tantangan dimaksud serta mampu mendinamisasi seluruh potensi kekuatan nasional.

Tekad yang telah terpatrit di dada setiap prajurit TNI AD/ABRI adalah apa yang terbaik untuk rakyat itulah yang terbaik untuk ABRI namun tetap dalam format mengedepankan kepentingan nasional.

Sesuai tekad TNI/ABRI di atas, dalam menghadapi gelombang globalisasi, liberalisasi, dan transisi, dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang, serta muatan-muatan yang dapat mengancam nilai, jatidiri, sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka sikap TNI/ABRI adalah:

Pertama, terhadap keberhasilan pembangunan di bidang

ekonomi dan kerawanan menghadapi liberalisasi ekonomi, TNI/ABRI menyikapinya sebagai masalah bangsa yang sangat penting dan mendasar menuntut harus lebih dicermati, diantisipasi dan diwaspadai melalui partisipasi TNI/ABRI dalam penentuan kebijakan politik ekonomi dalam meningkatkan daya saing perdagangan internasional dengan peningkatan kualitas aktualisasi fungsi Sospol TNI/ABRI.

Kedua, terhadap kemajemukan komponen bangsa, sikap TNI/ABRI adalah tetap konsisten memelihara dan mempersatukan arah, sasaran, dan tujuan seluruh aktivitas komponen bangsa Indonesia agar mendukung dan mempromosikan kepentingan nasional. Dengan demikian, TNI/ABRI membulatkan tekadnya berperan mengintegrasikan (Integrator) seluruh kelompok masyarakat dan komponen bangsa tetap terpeliharanya dan mantapnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.

Ketiga, terhadap semakin kritisnya daya pikir masyarakat, sikap TNI/ABRI adalah menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan dan perubahan situasi dengan mewujudkan kepemimpinan dan Komunikasi Sosial TNI/ABRI yang semakin adaptif, aspiratif dan komunika-

tif guna mensosialisasikan azas musyawarah untuk mufakat dalam setiap mekanisme pengambilan keputusan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Keempat, terhadap kepentingan nasional bangsa Indonesia, sikap TNI/ABRI adalah mendukung, mengamankan, dan mempromosikannya serta mengajak dan mendorong seluruh lapisan masyarakat secara persuasif konstruktif untuk memperjuangkan kepentingan nasional serta mencegah pihak-pihak lain yang akan merugikan kepentingan nasional sebagai perwujudan rasa tanggung jawab berbangsa dan bernegara Indonesia.

Bagi TNI/ABRI sebagai komponen bangsa, yang melaksanakan fungsi sebagai kekuatan Hankam dan kekuatan Sospol, dituntut semakin mewaspadai, dan melakukan upaya secara konseptional terhadap ancaman yang diprediksi atau yang akan dihadapi bangsa Indonesia berupa: (1) kemungkinan tumbuhnya sikap, cara berpikir, dan cara bertindak yang mengutamakan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok dengan memaksakan tolok ukur nilai-nilai universal, semangat serta nilai-nilai liberal yang membahayakan nilai, jati diri, serta sistem bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia, yang berkembang dari masalah SARA, kerawanan sosial,

kerusuhan massa, teror, dan pemberontakan yang akhirnya pada ujung yang ekstrim akan mengarah pada disintegrasi nasional dan (2) kemungkinan terjadinya gangguan dan kemendegan atas jalannya pembangunan nasional yang diakibatkan ketidakmampuan dalam mengatasi tantangan gelombang globalisasi, liberalisasi, dan transisi.

2. Peran TNI/ABRI

Dalam menghadapi kemungkinan ancaman, dikaitkan dengan tekad dan sikap untuk memantapkan perannya sebagai stabilisator, dinamisator dan integrator. Implementasi dari peran TNI/ABRI tersebut adalah sebagai berikut:

Peran sebagai stabilisator menuntut TNI/ABRI untuk mampu menciptakan kondisi yang menjamin kesinambungan penyelenggaraan pembangunan nasional.

Peran sebagai dinamisator menuntut ABRI untuk mampu mendinamisasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh segenap komponen bangsa agar dicapai optimalisasi hasil kerja dengan cara mendorong motivasi kerja, etos kerja, semangat kerja dan produktivitas kerja yang menunjang modernisasi manajemen dan dukungan sistem informasinya.

Peran sebagai integrator menuntut ABRI dapat mengintegrasikan aspirasi atau kepen-

tingan individu dan berbagai kelompok yang ada di masyarakat agar tetap mengalir dalam arus kepentingan nasional, sehingga TNI/ABRI mampu menempatkan dirinya sebagai perekat bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang timbul, TNI/ABRI lebih menitikberatkan kepada pencapaian kesiapan TNI/ABRI yang mampu melaksanakan tugas sesuai dengan harapan rakyat dan negara. Upaya menciptakan kesiapan TNI/ABRI dilakukan dalam bentuk penyiapan perwira yang mampu melaksanakan tugas kewajiban TNI/ABRI. Hal ini berarti perlunya pemenuhan, kualitas perwira yang dapat menjamin terciptanya kemampuan untuk mengatasi tantangan dan ancaman abad ke-21.

Tuntutan Kualitas Perwira TNI AD

1. Kedudukan dan Peran Perwira

Perwira merupakan pengawas organisasi yang berada pada strata pimpinan, sedangkan tamtama merupakan pelaksana yang dibimbing dan dikoordinasikan oleh para bintara. Sebagai pimpinan, perwira berperan amat dominan dan menduduki

posisi strategis dalam setiap gerak dinamik pelaksanaan tugas organisasi sehingga menentukan keberhasilan pencapaian sasaran serta tujuan yang ditentukan sebelumnya. Posisi kunci perwira menggambarkan kebenaran aksioma bahwa tidak ada bawahan yang salah jika terjadi kegagalan pelaksanaan misi satuan, karena sesungguhnya apa yang dilakukan setiap bawahan tergantung dari apa yang diarahkan oleh Perwira yang memimpinya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini dan di masa yang akan datang, keberadaan TNI/ABRI akan tetap menjadi tumpuan harapan masyarakat, mengingat TNI/ABRI sebagai anak kandung rakyat dipastikan tidak akan tinggal diam dalam mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada abad ke-21. Oleh karenanya dalam mengimplementasikan tekad terbaik bagi rakyat, itulah terbaik bagi TNI/ABRI" merupakan sesuatu yang harus tetap mewarnai cara berpikir, bersikap dan berperilaku para perwira TNI/ABRI dalam upaya menyukseskan pembangunan nasional serta memelihara integritas bangsa Indonesia.

Dengan demikian, perwira TNI/ABRI dituntut untuk lebih peka, peduli dan responsif dalam menampung berbagai aspirasi, komunikatif dan akomodatif da-

lam menyelesaikan masalah serta tanggap dan waspada terhadap berbagai gejala yang timbul di lingkungan masyarakat.

Oleh karena itu, setiap perwira memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemimpin dan manager atas satuan atau unit kerjanya. Sebagai pemimpin dengan bekal ilmu dan seni yang dimilikinya, perwira memberikan warna terhadap satuannya dalam mengarahkan dan menggerakkan bawahannya atau orang lain untuk bersikap dan berperilaku ke arah pencapaian tujuan. Sedangkan sebagai manager, dengan bekal profesionalisme dan kemahirannya, perwira bertanggungjawab untuk mengoptimalkan efek sinergi demi mencapai hasil guna dan daya guna secara maksimal.

Guna menyukseskan peran ganda tersebut, perwira dituntut untuk memiliki kemampuan internal dan eksternal. Kemampuan internal adalah kapasitas berbagai hal yang mendukung kemudahan terwujudnya kualitas jati diri selaku manusia dengan segala karakteristik dan aspek pendukungnya, meliputi mental, moral, spiritual yang kuat dan baik serta kadar intelektual yang sepadan dengan lingkungannya. Sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan eksternal adalah kapasitas berbagai hal yang dapat mendukung kemudahan terwujudnya kualitas pribadi se-

bagai makhluk sosial yang harus melakukan interaksi dengan sesama manusia dalam lingkungan kerja atau satuannya, lingkungan hidup dan lingkungan sosialnya.

2. Kriteria Kualitas Perwira

Berdasarkan kriteria kemampuan dan menurut sudut pandang ketahanan nasional bangsa Indonesia, maka kriteria kualitas perwira diarahkan kepada karakteristik yang dibutuhkan pada skala individu, yang apabila diintegrasikan pada skala nasional akan dapat menunjang terwujudnya ketahanan nasional yang dapat diandalkan. Mengingat dalam ketahanan nasional terkandung ketangguhan yang berdimensi daya nalar dan daya rasa serta keuletan yang berdimensi daya cipta dan daya karya, maka ketahanan pribadi seorang perwira harus menggambarkan keuletan dan ketangguhan pribadi menghadapi setiap AGHT yang harus diatasi menurut kemampuan dalam skala pribadi.

Kriteria dasar kualitas perwira yang menjadi tuntutan saat ini adalah sebagai berikut: (1) pimpinan TNI AD/ABRI adalah Pancasilais sejati, (2) memiliki kepekaan jiwa kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi, mengutamakan persatuan dan kesatuan, (3) memiliki pengetahuan luas baik ilmu kemiliteran mau-

pun ilmu-ilmu sosial dan eksakta serta mampu berkomunikasi dengan baik, (4) sederhana, tegas, jujur dan adil serta memiliki loyalitas vertikal dan horizontal yang lugas dan tanpa pamrih, (5) ulet, tangguh dan pantang menyerah serta senantiasa membela kebenaran dan keadilan, (6) mampu mengimplementasikan 11 azas kepemimpinan TNI/ABRI dalam kehidupan sehari-hari, dan (7) mampu menganalisis secara jernih serta mengambil keputusan dengan tepat dan cepat sesuai prosedur yang berlaku.

Dihadapkan dengan fenomena globalisasi yang sedemikian rumit dan kompleks, penuh ketidakpastian dan perubahan yang cepat sebagai akibat pesatnya laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun kemungkinan terjadinya pergeseran nilai dan terbentuknya tatanan baru, serta rumusan peran TNI/ABRI pada abad ke-21, maka diperoleh tiga dimensi tuntutan kualitas perwira TNI AD sebagai berikut:

Pertama, dimensi kepemimpinan, yaitu memiliki figur dan kemampuan kepemimpinan militer dan masyarakat yang responsif, adaptif, aspiratif, dan komunikatif terhadap penyelesaian masalah lokal maupun nasional, serta menjamin dukungan dan keamanan terhadap kepentingan nasional.

Kedua, dimensi intelektual, yaitu memiliki wawasan yang luas serta penguasaan iptek yang sepadan di lingkungannya, didukung oleh kemandirian dan kemampuan berkomunikasi serta memiliki ketangguhan dan keuletan dalam mengaplikasikan intelektualitasnya bagi kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Ketiga, dimensi profesional, yaitu kemampuan pelaksanaan tugas secara tepat, sistematis, efektif dan efisien didukung oleh ketrampilan, kreativitas, inovasi, dan motivasi yang tinggi dalam setiap perkembangan situasi.

Tuntutan kualitas perwira di atas bertumpu di atas keselarasan dan keseimbangan antara tuntutan kepemimpinan dan etika moral, tuntutan intelektual dan spiritual, serta tuntutan profesional dan kesetiaan. Dalam implementasinya tuntutan kualitas perwira tersebut harus dilandasi oleh moral, integritas dan loyalitas yang bersumber pada keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai jati diri perwira dalam format persatuan dan kesatuan bangsa.

Berangkat dari kriteria dasar dan tuntutan kualitas perwira untuk menghadapi tantangan di atas, maka dapat dirumuskan kriteria kualitas perwira TNI/ABRI abad ke-21 yang mampu melaksanakan tugas di fungsi

Hankam dan fungsi Sospol sebagai berikut: (1) memiliki integritas yang tinggi, yang merupakan totalitas dari kepribadian yang kuat maupun kualitas spiritual dan moral yang tinggi serta kualitas intelektual dan wawasan yang luas, termasuk kukuhnya jatidiri kebangsaan, (2) memiliki kapasitas, baik dalam arti wawasan, pengetahuan, pengalaman dan kemampuan-kemampuan lain untuk mampu memimpin masyarakat, bangsa dan negara, (3) memiliki visi kebangsaan yang bulat dan utuh serta mampu mewujudkan visi tersebut menjadi garis-garis kebijakan dan strategi, untuk selanjutnya dikomunikasikan ke organisasi dan masyarakat yang dipimpin, (4) mampu memecahkan permasalahan-permasalahan kebangsaan termasuk kemampuan mengambil keputusan pada situasi kritis dan melaksanakan keputusan itu, agar gerak kesinambungan bangsa terus berlangsung, (5) mampu mempersatukan bangsa dan memperkuat integritas nasional, sebagai prasyarat utama terwujudnya ketahanan dan kekuatan nasional yang siap menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan, (6) mampu mendinamisasi dan menyukseskan pembangunan bangsa, yang menyentuh segala aspek kehidupan bangsa berikut tantangan dan permasalahannya yang senantiasa berkembang,

dan (7) mampu memperjuangkan kepentingan nasional dalam peredaran dunia, melalui berbagai peran dan kegiatan.

Berdasarkan berbagai kriteria sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan kebulatan kriteria kualitas perwira ABRI/TNI AD yang diharapkan mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 dapat diformulasikan sebagai berikut:

Memiliki kualitas dan integritas pribadi yang kuat, bersifat adaptif, responsif, aspiratif dan komunikatif terhadap setiap permasalahan yang muncul di lingkungannya, serta kapabel, akseptabel dan dedikatif dalam setiap pelaksanaan tugasnya, mampu mengajak masyarakat untuk mau dan berkembang ke arah yang lebih baik, didasari oleh etika dan moral kebangsaan yang tinggi serta kekentalan kadar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tulus, dengan senantiasa menjunjung tinggi kode etik perwira "Budi Bhakti Wira Utama dan Dwi Warna Purwa Cendekia Wusana", sehingga mampu menempatkan diri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa yang tangguh menuju tercapainya tujuan nasional dan cita-cita nasional dalam rangka melestarikan eksistensi bangsa dan mempertahankan kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kesimpulan

Menghadapai abad ke-21 yang diwarnai dengan berbagai fenomena perubahan dan sarat dengan tantangan, TNI AD sebagai bagian integral dari TNI/ABRI, sekaligus sebagai bagian dari komponen bangsa dalam dituntut untuk lebih peka, antisipatif dan proaktif dalam melaksanakan perannya baik sebagai kekuatan Hankam maupun sebagai kekuatan Sospol yang merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka mengamankan eksistensi dan integritas bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, profesionalisme yang didasarkan pada visi kebangsaan perlu terus dikembangkan melalui berbagai upaya pembenahan dalam berbagai sistem pembinaan, terutama sistem pembinaan SDM, serta sistem pendidikan dan latihan agar memiliki tingkat kualitas yang memadai.

Dalam menghadapi perkembangan dinamika lingkungan sosial yang sangat cepat, penerapan kepemimpinan yang adaptif, aspiratif, responsif dan komunikatif serta yang kapabel, akseptabel dan dedikatif berkapasitas sebagai integrator nasional serta didukung oleh etika dan moral yang dilandasi iman dan taqwa merupakan tuntutan yang tidak

dapat dihindari (*conditio sine qua non*).

Para perwira TNI AD sebagai pemimpin dituntut memiliki daya saing agar berkemampuan untuk bersaing secara kompetitif

sehingga dapat menjadi putra terbaik bangsa. Oleh karenanya daya saing ini perlu dibangun, ditumbuhkembangkan sejak awal.